

**REVOLUSI MESIR 23 JULI 1952: BERAKHIRNYA
PEMERINTAHAN RAJA FAROUK**

RINGKASAN SKRIPSI



Oleh:
Diana Trisnawati
09406241012

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2013**

REVOLUSI MESIR 23 JULI 1952: BERAKHIRNYA PEMERINTAHAN RAJA FAROUK

Oleh:

Diana Trisnawati

Pembimbing:

Terry Irenewaty

ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan: (1) untuk mengetahui kondisi politik, sosial, dan ekonomi Mesir di bawah pemerintahan Raja Farouk, (2) mengungkapkan peran dan kontribusi gerakan *Free Officers* (Perwira Bebas) dan gerakan Ikhwanul Muslimin dalam menggulingkan kekuasaan Raja Farouk, (3) mengetahui proses terjadinya Revolusi Mesir 23 Juli 1952, dan (4) mengetahui kondisi Mesir pasca Revolusi Mesir 23 Juli 1952.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode sejarah kritis seperti yang dijabarkan oleh Kuntowijoyo. Metode ini memiliki langkah-langkah: (1) Pemilihan topik, (2) heuristik, (3) kritik sumber, (4) interpretasi, dan (5) historiografi atau penulisan sejarah.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa keadaan politik Mesir masa pemerintahan Raja Farouk banyak mengalami kekacauan, diantaranya sering terjadi pergantian kabinet dalam waktu yang relatif singkat, dan adanya dominasi Inggris yang berperan dalam setiap pengambilan kebijakan pemerintah. Terjadi ketimpangan sosial yang cukup tajam antara golongan elit yang terdiri dari tuan tanah dan pengusaha dengan petani kecil. Perekonomian Mesir mengalami degradasi dengan banyaknya pengangguran, kemiskinan, tingkat pendapatan per kapita yang rendah, dan ekspor kapas menurun. Keadaan tersebut membuat munculnya banyak kelompok oposisi dalam masyarakat yang diwakili oleh *Free Officers* (Perwira Bebas) dan Ikhwanul Muslimin. *Free Officers* (Perwira Bebas) dan Ikhwanul Muslimin sama-sama merasa prihatin terhadap kondisi Mesir dan memberikan kontribusi yang besar dalam mewujudkan Revolusi Mesir 23 Juli 1952. *Free Officers* (Perwira Bebas) di bawah komando Gamal Abdul Nasser menggerakkan pemberontakan untuk menggulingkan Raja Farouk. Puncak revolusi terjadi pada tanggal 23 Juli 1952 ditandai dengan banyaknya pusat-pusat pemerintahan yang diduduki oleh kelompok militer anti Raja Farouk. Revolusi tersebut berhasil dan sekaligus mengakhiri kekuasaan Farouk di Mesir. Pasca revolusi, pemerintahan Mesir dikendalikan oleh Dewan Mangkubumi. Pemerintahan monarki dirasa tidak sesuai dengan perkembangan politik internasional dan hanya menimbulkan otoritarian penguasa. Pada tanggal 18 Juni 1953 sistem pemerintahan monarki Mesir diganti dengan republik, sekaligus pengangkatan Muhammad Naguib sebagai presiden.

Kata kunci: Revolusi Mesir 23 Juli 1952, Pemerintahan, Raja Farouk

A. LATAR BELAKANG

Mesir atau Republik Arab Mesir adalah negara sosial demokrasi berbentuk republik, dengan kepala negara seorang presiden. Secara geografis, Mesir merupakan salah satu negara yang berada di wilayah Afrika Utara, tetapi jika dilihat dari sudut sejarah dan kebudayaannya, Mesir merupakan bagian dari Asia Barat (Hitti Philip K, 2001: 236). Keberadaan Mesir memiliki arti penting bagi dunia internasional, karena kebudayaan Mesir menjadi tolok ukur perkembangan kebudayaan di dunia. Keberuntungan itu semua tidak terlepas dari wilayah Mesir yang merupakan gerbang penghubung tiga benua: Asia, Afrika, dan Eropa. Hal ini membuat Mesir memiliki letak yang strategis, dan bangsa asing dengan mudah dapat masuk sekaligus menanamkan pengaruhnya kepada Mesir.

Mesir modern mengalami pergulatan sosial-politik yang panjang. Semenjak masuk ke dalam wilayah kekuasaan Islam, Mesir mengalami pergantian rezim berkali-kali hingga saat imperialisme Inggris masuk dan mendirikan pemerintahan boneka berupa struktur kerajaan, sebagai sarana eksploitasi sumber daya alam yang dimiliki negara itu untuk kepentingan kapitalis. Sejarah Mesir modern secara umum mirip dengan yang terjadi di Turki, mengenai evolusi struktur dan budaya politik. Evolusi ini bermula dari reformasi pemerintahan, meskipun dalam perkembangannya, evolusi ini sempat terganggu oleh pendudukan Inggris sekitar tahun 1882-1952. Mesir modern sering mengalami pergulatan politik yang berkepanjangan dan bertahap. Sampai dengan tahun 2012 ini, terhitung sudah tiga kali Mesir melakukan revolusi yang didasarkan pada ketidakstabilan pemerintahan dan politik Mesir.

Revolusi yang pertama, terjadi pada tahun 1919 yang lebih dikenal dengan Revolusi Orabi. Kedua, Revolusi Mesir 23 Juli 1952 sekaligus menandai berakhirnya pemerintahan monarki Mesir dan menuju pada negara republik yang sarat akan modernitas. Revolusi terakhir, terjadi dalam rangka menggulingkan Presiden Hosni Mubarak pada bulan 26 Januari 2011 yang dipelopori oleh kalangan muda Mesir. Keadaan ini tentu tidak jauh berbeda

ketika Revolusi Mesir 23 Juli 1952 dilakukan dalam rangka mengubah wajah politik Mesir secara radikal.

Revolusi Mesir 23 Juli 1952 merupakan sebuah penggulingan kekuasaan Raja Farouk oleh gerakan yang disebut sebagai *Free Officers* (Perwira Bebas), yang dipimpin oleh Muhammad Naguib, Gamal Abdul Nasser, dan Anwar Sadat (Ira M Lapidus, 1991: 121). Pada masa-masa awal Revolusi, Muhammad Naguib diangkat sebagai presiden, walaupun pemimpin dan konseptor yang sebenarnya adalah Gamal Abdul Nasser itu sendiri.

Peran dan partisipasi golongan militer memang sangat besar dalam mewujudkan Revolusi Mesir 23 Juli 1952. Golongan militer ialah mereka yang menjadi kawan seperjuangan Gamal Abdul Nasser. Selain kelompok militer, partisipasi dan dukungan bagi terwujudnya Revolusi Mesir juga datang dari kelompok agamawan di Mesir. kelompok agamawan tersebut tergabung dalam Ikhwanul Muslimin yang dipimpin oleh Hasan Al-Banna. Ikhwanul Muslimin memberikan banyak pengaruh baik di bidang agama dan politik di Mesir (Dawissa, Adeed, 1986: 86). Kelompok Ikhwanul Muslimin dan gerakan *Free Officers* (Perwira Bebas) merupakan dua kekuatan besar yang berperan dalam menggulingkan kekuasaan Raja Farouk.

Peristiwa Revolusi Mesir 23 Juli 1952 merupakan peristiwa yang memberikan dampak yang cukup signifikan dalam kehidupan Mesir, baik dari segi politik, ekonomi, militer, dan pemerintahan. Terutama dalam bidang pemerintahan, Revolusi Mesir 23 Juli 1952 mengubah wajah dan arah perpolitikan. Mesir yang semula merupakan negara menggunakan sistem pemerintahan monarki parlementer, kemudian berubah menjadi republik demokrasi. Berdasarkan latar belakang inilah, penulis merasa tertarik untuk mengkaji tentang Revolusi Mesir 23 Juli 1952, dengan fokus kajian pada berakhirnya sistem pemerintahan monarki Mesir.

B. ISI

1. Kondisi Mesir Sebelum Revolusi Mesir 23 Juli 1952

Mesir memang diperebutkan oleh berbagai negara di Eropa, terkait dengan letaknya yang strategis. Negara-negara Eropa memberikan pengaruh pada Mesir, terutama pada masa penguasaan Inggris. Hal ini terkait dengan letaknya yang strategis berada di antara Benua Asia, Afrika, dan Eropa. Mesir sekitar abad ke-20 timbul usaha untuk mengakhiri kolonialisme Inggris di wilayah Mesir. Pemerintahan Inggris menguasai Mesir terlampau lama, yakni sejak tahun 1882 (M Hamdan Basyar, 1998: 85). Masyarakat Mesir amat memimpikan hidup bebas di negaranya tanpa ada penguasaan asing yang mendominasi. Pemerintahan Inggris menguasai Mesir dikarenakan ikut ambil bagian mengenai kepemilikan saham di Terusan Suez yang memiliki peran penting di dunia internasional.

Adapun keinginan untuk mewujudkan Mesir menjadi sebuah negara yang merdeka dipelopori oleh Partai Wafd yang merupakan partai terbesar Mesir. Partai Wafd memiliki pengaruh paling kuat dalam pemerintahan Mesir. Pemerintah Inggris merespon keinginan Partai Wafd dengan memberikan kemerdekaan bagi Mesir yang diproklamkan pada bulan Februari 1922. Keputusan yang diberikan Inggris kepada masyarakat Mesir ibarat memberikan harapan yang palsu. Meskipun Mesir diberi kemerdekaan, namun Inggris masih tetap mengurus hal-hal vital terkait dengan kenegaraan Mesir.

Kemerdekaan Mesir tahun 1922 terwujud karena adanya kerjasama antara para pemimpin Mesir yang terdiri dari kaum bangsawan, tuan tanah, dan para pekerja. Pada tahun 1923 Undang-Undang Dasar Mesir sebagai negara baru disahkan, namun Inggris masih mengawasi gerak dan perkembangan Mesir. Hal ini dibuktikan dengan pemerintahan Inggris masih menetapkan gubernurnya di Mesir. Mesir diberikan kemerdekaan oleh Inggris sebagai negara monarki konstitusional dengan sebuah syarat.

Ketentuan yang harus dijalani Mesir demi status kemerdekaannya masih berkaitan erat dengan penguasaan Inggris di Mesir. Inggris

menetapkan empat masalah yang menjadi tanggung jawab Inggris di Mesir. Keempat masalah tersebut adalah (1) masalah Sudan, (2) keamanan Mesir dari intervensi asing, (3) pengawasan Terusan Suez, dan (4) penjaminan kepentingan asing dan minoritas. Pemerintahan Inggris tetap memiliki dominasi di Mesir tentu dengan alasan, bahwa Mesir dan Afrika Selatan merupakan pos terpenting untuk kerajaan Inggris. Mesir sebagai wilayah yang strategis banyak diperebutkan oleh bangsa-bangsa asing baik dari Eropa maupun Asia. Wilayah Mesir pernah pula menjadi jajahan Turki.

Di bawah Raja Fuad, Mesir mempunyai pemerintahan dan konstitusi yang tetap, akan tetapi hanya sebagai lambang dan boneka dari Inggris saja. Sampai ketika Raja Fuad meninggal dunia pada tanggal 28 April 1936, Mesir tampaknya belum adanya tanda-tanda merasakan kemerdekaan sepenuhnya. Sepeninggalan Raja Fuad, kemudian pemerintahan Mesir jatuh ke tangan Farouk, yang pada waktu itu masih berumur 17 tahun. Raja Farouk dilahirkan pada tanggal 11 Februari 1920. Raja Farouk menikah dengan seorang gadis cantik yang bernama Youssef Zufikar Pasha (Anshari Thayib, 1981: 6).

Raja Farouk sangat pandai untuk menarik simpati rakyat Mesir. Raja Farouk selalu bersikap baik dan ramah kepada rakyatnya untuk memberikan kesan bahwa Raja Farouk adalah pemimpin yang bijaksana. Raja Farouk memerintah di Mesir dengan gelar Farouk I. Melihat sifat dan perilakunya yang baik dan peduli terhadap rakyatnya, Raja Farouk menerima banyak pujian dari masyarakat Mesir. Rakyat menyambut pemerintahan Raja Farouk dengan sorak-sorai. Hal ini dikarenakan rakyat sudah lemas dengan pemerintahan diktator Raja Fuad. Munculnya Raja Farouk di pemerintahan Mesir awalnya dianggap sebagai rahmat yang turun dari langit untuk menolong Mesir. Nama Raja Farouk kemudian menjadi sangat populer di masyarakat dan banyak dibangga-banggakan oleh rakyatnya.

Memang, ada beberapa kalangan yang mendukung sepenuhnya kepemimpinan Raja Farouk di Mesir. Kalangan tersebut berasal dari masyarakat yang menginginkan perubahan pemerintahan Mesir, berbeda

dengan masa pemerintahan Raja Fuad. Kepemimpinan Raja Farouk pada sekitar tahun 1936 sebenarnya masih menimbulkan pro dan kontra oleh berbagai pihak. Partai Wafd yang merupakan salah satu partai memiliki banyak pendukung di Mesir sedikit menentang kepemimpinan Raja Farouk yang masih muda.

Partai Wafd pernah melakukan bentrok dengan istana dan Universitas Al-Azhar di bawah pimpinan Mustafa Nahas Pasha, bersikeras bahwa Raja Farouk tidak dapat melaksanakan kekuasaan penuh sebelum berumur dua puluh satu (yang baru akan dicapai tahun 1941), sedangkan raja mengklaim haknya ketika mencapai delapan belas tahun. Rektor Universitas Al-Azhar yang bernama Mustapha Al Maraghi, kemudian memberikan fatwa dan dukungan kepada Raja Farouk terkait dengan kekuasaannya sebagai pemimpin Mesir. Mustapha Al Maraghi merupakan musuh bebuyutan dari Partai Wafd.

Pada masa pemerintahan Raja Farouk, dikirimlah sebuah delegasi yang dipimpin oleh Perdana Menteri Nahas Pasha ke Inggris dalam rangka musyawarah perjanjian keamanan bersama. Perjanjian tersebut dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 1936, empat bulan setelah Raja Farouk berkuasa di Mesir. Dengan dalih melaksanakan perjanjian tersebut, Inggris berhak menempatkan pasukan-pasukannya di wilayah Mesir.

Di dalam situasi seperti itu, muncullah beberapa perpecahan di dalam masyarakat Mesir. Kelompok-kelompok tersebut muncul sesuai dengan idealisme mereka. Adapun kelompok tersebut ada yang mendukung Inggris, ada yang pro fasis (Italia dan Jerman), dan ada pula anti Inggris dan Italia. Gamal Abdul Nasser berserta rekan-rekannya inilah yang kemudian meletakkan pilihannya pada kelompok anti Inggris maupun Italia. Di bawah pemahaman yang sama, mereka kemudian menyatukan kekuatan untuk melawan pemerintahan yang pro Inggris.

Mesir banyak mengalami pergolakan politik sebelum revolusi. Pemerintahan Mesir di bawah Raja Farouk mengalami kemerosotan dalam berbagai bidang. Tidak adanya pembatasan kekuasaan raja, membuat raja

bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di dalam pemerintahan. Penyimpangan tersebut salah satunya ditandai dengan maraknya korupsi yang dilakukan oleh kalangan bangsawan, kriminaitas, dan ketidak-adilan membuat kekecewaan dikalangan kelompok-kelompok masyarakat. Hal tersebut merupakan akibat dari kejahatan dan kekecewaan terhadap pemerintahan Raja Farouk.

Korupsi merupakan salah satu penyimpangan yang dilakukan oleh Raja Farouk. Raja Farouk memiliki asset yang beragam, uang, dan lahan yang luas. Perlu diketahui, sebenarnya perilaku korupsi di Mesir mulai ada sejak penguasaan Muhammad Ali Pasha 1765. Sampai pada saat Revolusi Mesir 23 Juli 1952 dicetuskan, topik yang paling hangat dibicarakan adalah tentang korupsi.

Adanya berbagai kemerosotan di berbagai bidang terkait dengan pemerintahan Raja Farouk di Mesir, menimbulkan oposisi di kalangan masyarakat. Muncul kelompok-kelompok yang menentang pemerintahan Raja Farouk, baik yang berlatar-belakang agama maupun nasionalis. Kubu-kubu masyarakat anti pemerintahan Raja Farouk dan dominasi Inggris terus berkembang dan melaju untuk mencari dukungan dari masyarakat secara lebih luas. Pada mulanya mereka bergerak secara bebas tanpa mengenal misi dari masing-masing kelompok, akan tetapi pada akhirnya mereka menyatukan kekuatan di bawah tujuan yang sama, yakni menggulingkan kekuasaan Raja Farouk di Mesir.

Adanya pembaharuan di dalam masyarakat, dimana mulai ditinggalkannya adat yang berkaitan dengan Islam, semakin menambah suasana memanas. Muncullah kalangan-kalangan tertentu dengan tekad untuk melawan bentuk-bentuk sekular dalam pemerintahan. Perseteruan di antara kelompok-kelompok masyarakat dengan pemerintahan Raja Farouk semakin gencar. Ada beberapa kelompok masyarakat yang menentang dan merasa tidak senang dengan pemerintah. Kelompok-kelompok tersebut antara lain: Partai Wafd, Partai Sosialis Mesir, Ikhwanul Muslimin, dan Gerakan *Free Officers* (Perwira Bebas). Pembentukan kelompok-kelompok

tersebut bermula dari kekecewaan masyarakat terhadap pemerintahan Raja Farouk. Meskipun masing-masing kelompok dalam masyarakat memiliki misi, namun tujuan utama mereka sama yaitu ingin menggulingkan kekuasaan Raja Farouk yang sudah melampaui batas.

Situasi kemerosotan sosial dan ekonomi di Mesir semakin diperparah dengan banyaknya pengangguran tenaga kerja produktif Mesir. Lapangan kerja yang terbatas, dan kaum imigran dari wilayah pedesaan yang berpindah ke Kairo tidak mendapatkan pekerjaan. Terjadinya ketimpangan sosial di Mesir bukan merupakan satu-satunya faktor kemerosotan bagi Mesir, namun keadaan tersebut menjadi semakin kacau mengingat Inggris masih melakukan kolonisasi terhadap Mesir.

Kondisi tersebut tentu mengundang perhatian masyarakat Mesir untuk segera berbenah diri. Sebelum adanya perebutan kekuasaan yang kemudian dikenal dengan sebutan Revolusi Mesir 23 Juli 1952, Mesir merupakan sebuah negara yang bersifat semi feodal. Mengenai kemerosotan bidang ekonomi Mesir, sedikit banyak diungkapkan pula oleh Eric A Nordlinger (1990: 266-267), dalam buku *Militer dalam Politik: Kudeta dan Pemerintahan*. Sebagaimana dijelaskan, masyarakat kelas menengah ke bawah Mesir berada dalam kubangan kebodohan dan penindasan atas kekuasaan Raja Farouk dan penguasa Inggris.

Hampir di segala bidang kehidupan Mesir mengalami degradasi yang cukup signifikan. Keadaan *chaos* tersebut menimbulkan banyaknya kerusuhan dalam masyarakat Mesir yang berupa penjarahan, perampokan, dan perselisihan antar kelompok. Banyaknya tuntutan perubahan yang harus dilakukan oleh Mesir, membuat Gamal Abdul Nasser dan pengikutnya berpikir lama. Melalui kemampuannya, Nasser berusaha melakukan koordinasi dan menemukan jawaban atas kesulitan-kesulitan yang dialami oleh bangsa Mesir secara hati-hati tanpa menyakiti pihak lain (Cremeans, Charles D, 1963: 29).

2. Munculnya Dua Kekuatan Melawan Raja Farouk

Kelompok militer Mesir juga memiliki keterwakilan kekuatan dalam menyikapi gejolak kemerosotan di negaranya. Pertentangan-pertentangan yang terjadi di kalangan militer kemudian menjadikan sebuah kekuatan untuk bergerak maju. Kelompok militer juga memulai debutnya melalui pembicaraan-pembicaraan singkat dan diskusi ringan di markas tentara. Diskursus-diskursus sederhana tersebutlah yang kemudian melahirkan sebuah gagasan dibentuknya suatu perkumpulan para perwira militer Mesir.

Cerita dimulai pada tahun 1938, ketika beberapa perwira muda yang baru lulus dari akademi militer berkumpul di Markas Tentara Mankabad, Port Said (M Hamdan Basyar, 1988: 86). Para perwira militer sering berkumpul dan berbincang-bincang hingga larut malam. Topik yang selalu hangat dibicarakan adalah seputar permasalahan sosial dan politik di Mesir. Berawal dari pembicaraan yang sederhana mengenai topik tersebut, hingga akhirnya timbullah suatu tekad untuk mengadakan perubahan.

Pada tahun 1942 akhirnya dibentuklah suatu badan rahasia untuk melancarkan tujuan para *Free Officer* (Perwira bebas) tersebut. Badan rahasia tersebut menyusun pengurus dan seksi-seksi dengan tugas yang berlainan. Meskipun demikian, para pengurus dan seksi-seksi berada di bawah satu komando yakni Komite Pusat. Komite Pusat berperan mengatur seluruh kegiatan dan menentukan tujuan para pengurus serta seksi-seksi. Komite Pusat inilah yang kemudian menamakan diri mereka “Perwira Bebas”.

Gamal Abdul Nasser muncul sebagai pencetus ide badan rahasia yang diberi nama *Free Officers* (Perwira Bebas) tersebut. Selain Gamal Abdul Nasser, ada beberapa tokoh yang memiliki andil cukup besar di dalam badan tersebut. Mereka berasal dari kelompok yang sama, yakni kalangan militer yang merupakan teman seperjuangan Gamal Abdul Nasser. Tokoh-tokoh tersebut antara lain Kamaluddin Hussein, Abdul Hakim Amir, Hasan Ibrahim, Abdul Moniem, Abdul Rauf, Salah Salim, Jamal Salim, Abdul Latief Baghdadi, Khalid Moheiddin, dan Anwar Sadat.

Gerakan *Free Officers* (Perwira Bebas) bekerja secara diam-diam menyusup di setiap devisi angkatan bersenjata Mesir. Hal ini sesuai dengan sifat organisasi yang rahasia. Para pengurus dan seksi-seksi bekerja dengan hati-hati untuk melebarkan sayap mereka dalam rangka menghimpun kekuatan. Gamal Abdul Nasser sebagai pencetus sekaligus penggerak memimpin perjuangan dalam rangka mewujudkan kemerdekaan penuh bagi Mesir. Kalangan militer sangat membenci dengan kedudukan Inggris di Mesir, akan tetapi mereka hanya dapat melakukan gerakan secara diam-diam. Sangat beresiko apabila menunjukkan sifat anti atau menolak Inggris. Dengan kekuatan *Free Officers* (Perwira Bebas) yang masih minim, perlawanan terhadap Inggris belum dapat dilakukan.

Selain kelompok militer, munculnya kekuatan untuk melawan Raja Farouk berasal dari kelompok agamawan Mesir yang menamakan dirinya Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin atau yang kerap disebut dengan Al-Ikhwan al-Muslimun (Persaudaraan Muslimin) adalah organisasi yang didirikan oleh Hasan Al-Banna pada tahun 1928. Dalam Bahasa Inggris, Ikhwanul Muslimin sering disebut dengan *Muslim Brotherhood* dan *Muslim Brethren* (M Amien Rais, 1984: 28). Gerakan ini ingin menjadikan Islam sebagai sumber inspirasi kehidupan dalam masyarakat Mesir, termasuk kehidupan politiknya. Mereka mempersiapkan kadernya dengan doktrin Islam yang ketat demi mencapai tujuan. Bahkan, mereka juga melatih beberapa anggota dengan latihan militer.

Hasan Al-Banna merasa sangat prihatin dengan apa yang dilihatnya sebagai semakin merosotnya moral masyarakat yang disebabkan oleh dominasi politik dan intelektual barat. Dewasa ini massa Islam memang berada dalam situasi resah karena berbagai faktor. Semuanya itu memang merupakan sumber kegundahan bagi warga masyarakat selaku individu ataupun sebagai anggota kelompok. Salah satunya adalah Hasan Al-Banna yang merasa cemas terhadap nasib generasi muda Mesir, apabila pendudukan Inggris masih terus bercokol di Mesir. Ia berusaha merenung dan memikirkan bagaimana cara untuk membendung pengaruh asing

tersebut agar tidak merusak keislaman Mesir. Bahkan ketika beliau menemui ulama, beliau diperintahkan untuk mundur. Baru setelah kekecewaannya terhadap ulama pemimpin inilah Hasan Al-Banna mulai mengorganisir perkumpulan aktivisnya sendiri untuk memperkuat iman dan amal Islam.

Berawal dari diskusi-diskusi sederhana yang diciptakan oleh Hasan Al-Banna dan rekan-rekannya tersebut, lama-kelamaan Hasan Al-Banna memiliki pengikut yang setia terhadap pemikirannya dan sejalan dengan tujuannya. Pada bulan Maret 1928 dengan dorongan enam orang pekerja dari Ismailiyah, Hasan Al-Banna mendirikan Ikhwanul Muslimin. Pada mulanya, gerakan kelompok Ikhwanul Muslimin tidak menjadi masalah yang berarti bagi pemerintahan Mesir. Gerakan Ikhwanul Muslimin hanyalah semacam gerakan pembaharuan masyarakat yang memiliki sasaran yang berkaitan dengan Islam.

Sejak didirikan, tujuan-tujuan dan kerja Ikhwanul Muslimin tetap berpegang teguh pada kemurnian dokumen-dokumen sejarah serta aturan anggaran dasar yang didalamnya terkandung materi tujuan. Anggota Ikhwanul Muslimin memiliki sifat terbuka dan persaudaraan yang kuat dengan sesama anggota, maupun dengan masyarakat secara luas. Sifat terbuka demikian merupakan elastisitas jamaah Ikhwanul Muslimin dalam interaksi dengan sarana-sarana lain yang berhubungan dengan keimanan dan sarana alamiah.

Antara Ikhwanul Muslimin dan *Free Officers* (Perwira Bebas) memang sudah terjalin ikatan emosional yang sangat kuat. Hal itu dibuktikan ketika berita terbunuhnya Hasan Al-Banna sampai di garis depan (saat Perang Palestina 1948), banyak sekali anggota *Free Officers* (Perwira Bebas) yang datang secara sembunyi-sembunyi ke kemah Ikhwanul Muslimin untuk menyampaikan belasungkawa (Ishak Mussa Al Husaini, TT: 169). Sikap solidaritas dan hubungan persaudaraan antara Ikhwanul Muslimin dan Ikhwanul Muslimin tidak hanya dibuktikan dalam hal tersebut saja. Pada peristiwa setelah tahun 1948, Ikhwanul Muslimin dan *Free*

Officers (Perwira Bebas) dihadapkan pada permasalahan yang sama. Hal tersebut mengharuskan antara Ikhwanul Muslimin dan *Free Officers* (Perwira Bebas) untuk sama-sama bekerjasama dalam satu pandangan. Peristiwa tersebut adalah manakala terjadi perjuangan Terusan Suez tahun 1951-1952, Ikhwanul Muslimin dan *Free Officers* (Perwira Bebas) berada pada satu sisi yang sama. Dalam pertemuan antara anggota Dewan Revolusi Kamaluddin Husain, para wakil cabang Ikhwanul Muslimin hadir bersama-sama dengan anggota *Free Officers* (Perwira Bebas), bahkan para *Free Officers* (Perwira Bebas) membantu Ikhwanul Muslimin dengan persenjataan.

Hubungan erat antara Ikhwanul Muslimin dengan *Free Officers* (Perwira Bebas) terus berlanjut hingga pecahnya Revolusi Mesir 23 Juli 1952. Antara Ikhwanul Muslimin dan *Free Officers* (Perwira Bebas) memiliki andil yang cukup besar dalam peristiwa tersebut. Meskipun demikian, sebenarnya tidak semua anggota Ikhwanul Muslimin turut serta berperan dalam Revolusi Mesir 23 Juli 1952. Hudaibi, sebagai pemimpin Ikhwanul Muslimin pasca terbunuhnya Hasan Al-Banna memilih mengasingkan diri saat revolusi berlangsung hingga akhir pemerintahan Raja Farouk, namun sejarah tetap mencatat bagian Ikhwanul Muslimin dalam Revolusi Mesir 23 Juli 1952.

3. Revolusi Mesir 23 Juli 1952

Telah banyak peristiwa-peristiwa yang mendorong terjadinya Revolusi Mesir 23 Juli 1952, terutama dengan berkembangnya kekuatan progresif di kalangan masyarakat yang didukung sepenuhnya oleh kekuatan gerakan *Free Officers* (Perwira Bebas). Dukungan yang diberikan masyarakat tersebut, berawal dari keprihatinan dan kepedihan yang dialami selama pemerintahan Raja Farouk. Selain itu, ditambah dengan kuatnya dominasi penguasaan asing yang ikut ambil bagian di wilayah Mesir. Sektor-sektor penting terkait dengan pertahanan dan keamanan Mesir dipercayakan oleh pemerintah kepada Inggris.

Jatuh banggunnya kabinet dalam pemerintahan Mesir yang hanya berumur pendek membuat kekacauan politik dalam tubuh Mesir. Baik kabinet yang dipimpin oleh Hilaly Pasha maupun Husein Sirry Pasha sama-sama memiliki program kerja yang serupa, yakni ingin mengembalikan Mesir ke dalam situasi yang aman dan tenang. Selain itu, adanya pergantian kabinet Mesir tentu tidak lepas dari hak prerogatif yang dimiliki oleh Raja Farouk, sebagai penguasa Mesir yang monarki. Peran Raja Farouk sangatlah besar dalam menjalankan lakon politik dan pemerintahan Mesir. Hanya orang-orang yang pro dan tunduk padanyalah yang nantinya akan menduduki jabatan dalam roda pemerintahan.

Mangkatnya kabinet Husein Sirry Pasha kemudian digantikan oleh Aly Maher Pasha. Kali ini Raja Farouk meminta bantuan kepada Muhammad Naguib yang saat itu telah diangkat menjadi Panglima Besar Angkatan Perang Mesir. Muhammad Naguib memiliki andil dalam pengangkatan Aly Maher Pasha setelah diberi wewenang oleh Raja Farouk untuk mengatur situasi dan kondisi Mesir yang semakin bergejolak. Raja Farouk sendiri telah menerima usul baik dari Muhammad Naguib pada hari Kamis, 24 Juli 1952, sehari setelah Revolusi Mesir dilancarkan.

Selain kekacauan politik, Mesir dihebohkan pula oleh banyaknya aksi-aksi militer yang dilakukan oleh kalangan tentara. Kalangan tentara tersebut yang lebih dikenal dengan sebutan *Free Officers* (Perwira Bebas), seperti yang telah banyak diuraikan dalam bab sebelumnya. Sebelum pecahnya Revolusi Mesir 23 Juli 1952, telah banyak pertumpahan darah yang dilakukan oleh kesatuan tentara Mesir yang pro pemerintahan Raja Farouk dengan kesatuan tentara yang anti terhadap pemerintahan Raja Farouk. Pasukan pro terhadap pemerintahan Raja Farouk tersebut merupakan pasukan pengawal kerajaan. Pasukan pengawal kerajaan menolak untuk menyerahkan diri kepada kalangan *Free Officers* (Perwira Bebas).

Semangat Revolusi Mesir 23 Juli 1952 tercermin dari dukungan yang diberikan oleh rakyat Mesir terhadap perjuangan Gamal Abdul Nasser dan rekan-rekannya. Masyarakat sudah jenuh dengan pemerintahan Raja Farouk

yang otoriter dan tidak memberikan kesejahteraan sosial. Para mahasiswa Universitas Al-Azhar yang dulunya sangat mendukung keberadaan Raja Farouk, beralih haluan menjadi pembela *Free Officers* (Perwira Bebas). Mereka turut serta dalam perjuangan untuk menegakkan keadilan bagi masyarakat Mesir.

Pada awalnya, *Free Officers* (Perwira Bebas) bermaksud melaksanakan rencana mereka sekitar tahun 1954 atau 1955, dan sementara itu mereka mulai menyebarkan selebaran gelap yang mencela rezim yang ditulis oleh Khaled Muhieddin di bawah arahan Nasser dan disebar dari tangan ke tangan, kepada tentara dan masyarakat sipil. Rencana revolusi yang akan dilancarkan tidak lama lagi itu, memiliki beberapa sebab: (1) korupsi politik dan konstitusi merajalela, (2) pembusukan kondisi ekonomi, (3) pendudukan Inggris yang terus berlangsung, (4) pembusukan kondisi sosial, dan (5) tragedi Perang Palestina tahun 1948.

Langkah pertama yang dilakukan dalam mewujudkan Revolusi Mesir 23 Juli 1952 adalah mengadakan beberapa pertemuan, baik sesama anggota *Free Officers* (Perwira Bebas), maupun dengan anggota Ikhwanul Muslimin. Salah satu pertemuan diadakan pada tanggal 10 Februari 1952. Dalam pertemuan tersebut, membicarakan bahwa *Free Officers* (Perwira Bebas) membutuhkan seorang pemimpin sebagai penggerak Revolusi Mesir 23 Juli 1952. Selain membicarakan mengenai pemimpin, pertemuan tersebut juga membahas mengenai korupsi, dan pemerintahan diktator Raja Farouk.

Free Officers (Perwira Bebas) berusaha mencari dukungan, baik kepada anggota Ikhwanul Muslimin, maupun masyarakat Mesir secara luas. *Free Officers* (Perwira Bebas) menganggap bahwa selama ini Ikhwanul Muslimin merupakan organisasi yang melekat di hati rakyat Mesir. Terutama saat dipimpin oleh Hasan Al-Banna. Hubungan baik antara *Free Officers* (Perwira Bebas) dengan Ikhwanul Muslimin sudah terjalin sejak 1940. Namun, banyak yang menafsirkan berbeda mengenai hubungan tersebut. Ikhwanul Muslimin seolah hanya dimanfaatkan pada saat Revolusi Mesir 23 Juli 1952 saja, dan setelah itu dicampakkan. Bahkan pada akhirnya

nanti dibubarkan oleh Gamal Abdul Nasser, saat ia berkuasa sebagai presiden Mesir.

Untuk mencari dukungan massa, *Free Officers* (Perwira Bebas) membuat publikasi yang disebar di wilayah-wilayah strategis Mesir. Publikasi tersebut terdiri dari 2 jenis, yang pertama disebar kepada masyarakat Mesir, dan yang kedua disebar dikalangan tentara Inggris. Publikasi yang disebar kepada masyarakat Mesir berisi tentang ajakan untuk berjuang dan melawan kediktatoran Raja Farouk. Sedangkan publikasi yang disebar di kalangan tentara Inggris berisi ancaman, terror, dan tekanan. *Free Officers* (Perwira Bebas) menyerukan perlunya perubahan dalam pemerintah dan kebebasan dari pengaruh asing.

Setelah melihat keadaan yang semakin tak menentu, awalnya komite menetapkan tanggal 22 Juli 1952 sebagai awal revolusi. Namun, ternyata prediksi tersebut kurang tepat, karena revolusi justru memuncak pada tanggal 23 Juli 1952. Semboyan para penggerak Revolusi Mesir 23 Juli 1952 adalah tekad dan keberanian. Waktu yang ditetapkan tengah malam, setelah seluruh rancangan garis besar operasi dibuat oleh Gamal Abdul Nasser. Adapun tahap yang direncanakan dalam serangan antara lain menangkap penguasa militer, menangkap penguasa sipil, dan menurunkan raja dari singgasananya.

Pada hari Rabu, 23 Juli 1952 pergolakan antara kalangan tentara yang pro dengan *Free Officers* (Perwira Bebas) kembali terjadi. Kali ini pergolakan lebih dahsyat dan memakan banyak korban, baik dari pihak Raja Farouk maupun *Free Officers* (Perwira Bebas). Radio Kairo sendiri telah sebanyak 2 kali menyiarkan secara resmi adanya *coup d'etat* di Mesir. Muhammad Naguib telah menyampaikan bahwa rakyat memilih dengan pilihannya sendiri. Tank-tank dan kesatuan-kesatuan berlapis baja pada Hari Rabu 23 Juli 1952 mengadakan gerak patroli di jalan-jalan besar Kairo.

Pertempuran yang terjadi di Kairo tersebut meletus setelah kesatuan-kesatuan artileri bertindak terhadap pasukan-pasukan pengawal Raja Farouk di Istana Abdin. Banyak yang menafsirkan bahwa terjadinya pertempuran

merupakan sebuah aksi yang ditujukan untuk menentang sistem pemerintahan monarki di Mesir. kalangan tersebut kemudian memperkuat dengan dugaan kolusi yang dilakukan oleh Raja Farouk. Tindakan kolusi tersebut yakni adanya pengangkatan ipar Raja Farouk, Ismail Sherin sebagai menteri pertahanan.

Puncak Revolusi Mesir 23 Juli 1952 memang sepertinya sangat singkat. Pada tanggal 23 Juli 1952 terjadi demonstrasi besar-besaran dan pertumpahan darah antara kalangan tentara militer. Muhammad Naguib beserta rombongannya memberikan tuntutan kepada Raja Farouk untuk segera mengubah pasal-pasal yang ada pada Undang-Undang Dasar Mesir, yakni tentang pemberian hak-hak prerogatif Raja untuk memecat pemerintah dan membubarkan parlemen. Dengan hak-hak prerogatif raja tersebut, maka apabila sesuatu pemerintah (kabinet) yang jalan politiknya tidak sesuai dengan kehendak raja dapat dibubarkan dan diganti oleh kabinet yang baru.

Selain menggulingkan kekuasaan Raja Farouk, agenda penting dari Revolusi Mesir 23 Juli 1952 adalah mengusir Inggris dari Mesir. Terutama di wilayah Terusan Suez, penjagaan pasukan Inggris sangat ketat. Meski harus dengan gencatan senjata, rakyat Mesir di bawah *Free Officers* (Perwira Bebas) siap untuk menggempur pasukan Inggris di Mesir. Rakyat tetap harus mencapai kemenangan dengan banyak pengorbanan.

Tanggal 26 Juli 1952, tepatnya pada Hari Sabtu, Raja Farouk meninggalkan Mesir dengan melewati Kota Iskandaria menuju ke arah barat laut menggunakan kapal "Yacht". Menurut pengumuman dari istana, Raja Farouk hendak pergi ke Amerika Serikat. Kepergian Raja Farouk dari tanah Mesir sekaligus mengakhiri kedudukannya sebagai orang pertama di negara tersebut. Setelah Farouk turun tahta, kemudian digantikan oleh putranya, Ahmad Fuad. Raja Mesir yang masih bayi tersebut tidak dapat menjalankan roda pemerintahan seperti pemimpin pada umumnya. Kemudian dibentuklah dewan mangkubumi yang bertugas untuk menjalankan pemerintahan Mesir, sambil menunggu Raja Ahmad Fuad tumbuh dewasa. Dewan Mangkubumi terdiri dari 4 orang, antara lain Marsekal Muhammad Naguib, Perdana

Menteri Aly Maher Pasha, ketua Pengadilan Tinggi Sanhoury Pasha, dan wakil ketua Pengadilan tinggi Soliman Hafiz Bey.

Dewan Mangkubumi dibentuk dalam rangka mengisi kekosongan dalam pemerintahan setelah Farouk turun dari jabatannya. Pembentukan Dewan Mangkubumi tersebut tidak sekaligus mengakhiri sistem pemerintahan monarki Mesir. Perubahan status pemerintahan monarki ke republik baru dilakukan kurang lebih 1 tahun setelah meletusnya Revolusi Mesir 23 Juli 1952. Dewan Mangkubumi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh bekas *Free Officers* (Perwira Bebas) yang tergabung dalam *Revolutionary Command Council*. Dewan sementara ini bertahan sampai dengan Juni 1953.

Pada hari Minggu, tanggal 27 Juli 1952 situasi Mesir sudah mulai tenang kembali. Farouk yang pada tanggal 26 Juli 1952 dikabarkan akan bertolak ke Amerika di bawah Duta besar Amerika Caffery, akhirnya memilih Italia sebagai tempat tinggal sementara untuk Farouk beserta keluarga. Farouk tiba di Pelabuhan Napels, Italia dengan penjagaan ketat oleh polisi untuk menghindari 200 wartawan dan juru foto yang hendak mengambil dokumentasi peristiwa tersebut. Farouk dengan menumpang kapal pesiar Mahroussa, mendarat di Pelabuhan Napels disambut baik oleh duta besar Mesir untuk Italia, Muhammad Abdul Aziz Badr Bey. Selanjutnya, pada hari Rabu 30 Juli 1952 diumumkan oleh kementerian Italia bahwa untuk sementara waktu mantan Raja Mesir tersebut boleh berdiam di Italia.

4. Kondisi Mesir Pasca Revolusi Mesir 23 Juli 1952

Selama Farouk berkuasa, dunia pers seolah mati suri. Banyak kasus yang ditutup-tutupi oleh pemerintah, terutama yang berhubungan dengan penyimpangan yang dilakukan oleh Farouk. Baru setelah Revolusi Mesir 23 Juli 1952 dilancarkan, tabir kegelapan tersebut mulai terbuka. Pelan namun pasti, penyelidikan tentang kasus yang membelenggu Mesir terungkap. Farouk tentu merupakan dalang di balik busuknya kasus tersebut. Salah satu

kasus yang banyak menjadi sorotan masyarakat Mesir adalah mengenai gagalnya Mesir dalam Perang Palestina dan peristiwa 26 Januari 1952.

Keadaan politik Mesir memang belum mendapat tatanan kembali sampai dengan tahun 1953. Pemerintah Mesir masih terus mencari jalan yang tepat untuk kehidupan bangsa Mesir selanjutnya. Masalah demi masalah juga menimpa pemerintahan Dewan Mangkubumi Mesir yang masih dini. Selain itu, pengadilan bagi oknum-oknum yang berada di belakang Farouk belum tuntas dilakukan. Farouk sampai dengan tahun 1953 masih berada di Italia beserta keluarganya. Terakhir kalinya keberadaan Farouk di Mesir, yaitu saat penanda-tanganan pernyataan lengsernya dari tahta kerajaan, kemudian berlayar ke Italia.

Pada tanggal 18 Juni 1953, *Revolutionary Command Council* mengumumkan penghapusan sistem monarki Mesir menjadi sebuah negara republik. Berkaitan dengan berdirinya Republik Mesir yang baru tersebut, segera diangkatlah presiden sebagai kepala negara. Pemerintah Mesir memang tidak banyak melakukan pertimbangan mengenai pengangkatan Muhammad Naguib sebagai presiden, namun sebenarnya Gamal Abdul Nasser lah yang memiliki ide tersebut.

Pencalonan tunggal Muhammad Naguib sebagai presiden pertama Mesir tidak banyak mendapat protes dari masyarakat Mesir, karena Muhammad Naguib terkenal dengan loyalitas dan tanggung jawabnya dalam *Free Officer* (Perwira Bebas). Selain itu, Muhammad Naguib telah lebih dari 1 kali menjabat sebagai perdana menteri di Mesir. Gamal Abdul Nasser yang terkenal dengan semangat nasionalismenya justru tidak mencalonkan dirinya sendiri sebagai presiden Mesir. Hal itu telah banyak dipertimbangkan oleh Gamal Abdul Nasser, karena masyarakat Mesir kurang suka dengan pemimpin yang masih muda.

Pasca beralihnya Mesir pada sistem pemerintahan republik, Mesir masih dihadapkan dengan berbagai pertikaian politik baik secara internal maupun eksternal. Konflik antara pemerintah dengan Ikhwanul Muslimin berujung pada pertikaian radikal dan pembubaran gerakan tersebut. Gamal

Abdul Nasser dan Muhammad Naguib adalah dua orang yang sama-sama memusuhi Ikhwanul Muslimin, terutama setelah gerakan tersebut mengadakan beberapa demonstrasi militer.

Tampilnya Muhammad Naguib sebagai presiden pertama Republik Mesir, tidak menyulutkan niat dan usaha Gamal Abdul Nasser untuk tetap melakukan dominasi dalam pemerintah. Dalam pandangan masyarakat, Muhammad Naguib dan Gamal Abdul Nasser sama-sama memiliki kharisma sebagai pemimpin. Namun, Gamal Abdul Nasser jauh lebih muda daripada Muhammad Naguib. Selain itu, pada masa pemerintahan Farouk Muhammad Naguib pernah menjabat sebagai perdana menteri menggantikan Aly Maher Pasha. Farouk juga pernah memberikan kepercayaan kepada Muhammad Naguib saat Mesir terjadi keributan pada bulan Juli 1952.

Muhammad Naguib dan Gamal Abdul Nasser sama-sama memiliki kepentingan dalam pemerintahan Mesir. Sering terjadi perselisihan pendapat di antara keduanya, namun perselisihan tersebut dapat diredamkan. Ketika menghadapi permasalahan terkait dengan Ikhwanul Muslimin, keduanya juga memiliki pandangan yang berbeda. Muhammad Naguib menilai bahwa peristiwa 28 Maret 1954 merupakan kudeta kedua, setelah kudeta 23 Juli 1952 yang lebih dikenal dengan sebutan Revolusi Mesir 23 Juli 1952. Muhammad Naguib tidak bisa mengendalikan keadaan, sehingga Gamal Abdul Nasser harus tampil ke depan mengepalai sebuah pemerintahan militer untuk meredakan konflik.

Peranan Gamal Abdul Nasser semakin tampak ketika ia menjadi pimpinan delegasi perundingan yang akan membicarakan konflik Terusan Suez, antara Inggris dengan Mesir pada tanggal 27 Juli 1954. Mulai saat itulah mata dunia melihat Gamal Abdul Nasser sebagai perwira muda yang mampu membawa perubahan besar bagi Mesir. Gamal Abdul Nasser dengan pelan namun pasti menggeser pamor Muhammad Naguib sebagai presiden Mesir.

Konflik antara Muhammad Naguib dan Gamal Abdul Nasser sebenarnya sudah dimulai sejak proses peralihan pemerintahan monarki ke

republik. Pada saat itu, Muhammad Naguib sebagai presiden terpilih ingin langsung mengadakan pemilu untuk memilih anggota parlemen dan mengembalikan pemerintahan negara ke tangan sipil. Namun, Gamal Abdul Nasser berpendapat bahwa sebaiknya pemerintah memulihkan keadaan sosial dan ekonomi yang hancur pasca Revolusi Mesir 23 Juli 1952 terlebih dahulu, kemudian barulah dilaksanakan pemilu.

Gamal Abdul Nasser memang secara intensif mengikuti perkembangan politik Mesir dan tidak segan-segan untuk turun tangan apabila dirasa perlu. Gamal Abdul Nasser selalu memberikan catatan kecil kepada Muhammad Naguib setiap pengambilan kebijakan pemerintahan. Muhammad Naguib ibarat boneka yang disetir oleh Gamal Abdul Nasser untuk mewujudkan keinginannya. Namun, Muhammad Naguib tampaknya tidak hanya ingin menjadi boneka dari Gamal Abdul Nasser yang jauh di bawah kedudukannya.

Ketegangan antara Gamal Abdul Nasser dan Muhammad Naguib semakin memanas. Gamal Abdul Nasser yang berusia jauh lebih muda kini tidak segan-segan untuk menegur atau menekan Muhammad Naguib sebagai presiden. Pemilu yang sejak terbentuknya republik sudah diidam-idamkan oleh Muhammad Naguib akhirnya terlaksana. Pemilu dilaksanakan pada bulan Juni 1956. Pada saat itu, Gamal Abdul Nasser berusia 39 tahun dan memiliki karir melejit dalam pemerintahan Mesir. Selain itu, kharisma Gamal Abdul Nasser sebagai pemimpin sangat populer di mata masyarakat.

Dalam pemilu tersebut, akhirnya Gamal Abdul Nasser terpilih sebagai presiden menggantikan Muhammad Naguib. Hal tersebut merupakan cita-cita Gamal Abdul Nasser sejak awal, yaitu menundukkan pemerintahan Mesir di bawah kekuasaannya. Tampilnya Gamal Abdul Nasser rupanya membuat Muhammad Naguib harus berada pada pesakitan. Muhammad Naguib dijebloskan ke tahanan rumah dan karir politiknya semakin lama semakin surut. Gamal Abdul Nasser tampil sebagai penguasa *defacto* Mesir pada tanggal 18 Juni 1956 (Taylor, Alan R, 1982: 47).

C. SIMPULAN

Pemerintahan monarki Mesir dianggap sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan, sehingga oleh pemerintah pasca tumbanganya Farouk yang didominasi oleh *Revolutionary Command Council* diganti menjadi republik. Berakhirnya sistem pemerintahan monarki tersebut dilatarbelakangi oleh sejumlah peristiwa berdarah yang disebut Revolusi Mesir 23 Juli 1952. Revolusi Mesir 23 Juli 1952 ini merupakan wujud dari kejenuhan dan kekecewaan masyarakat Mesir yang dipelopori oleh gerakan *Free Officers* (Perwira Bebas) dan gerakan Ikhwanul Muslimin terhadap pemerintahan di bawah Raja Farouk dan dominasi Inggris yang bercokol di Mesir.

Pada masa pemerintahan Raja Farouk, masyarakat hidup dalam kemiskinan, keterbelakangan, dan banyak terjadi ketimpangan sosial. Gamal Abdul Nasser yang mendalangi terbentuknya *Free Officers* (Perwira Bebas) merasa prihatin terhadap nasib bangsanya. Kelompok agamawan Mesir yang tergabung dalam Ikhwanul Muslimin juga merasa perlunya perubahan bagi Mesir khususnya ditegakkan kembali hukum dan nilai-nilai Islam. Dengan tujuan yang sama, gerakan *Free Officers* (Perwira Bebas) dan Ikhwanul Muslimin serta dukungan masyarakat melancarkan Revolusi Mesir 23 Juli 1952. Revolusi tersebut berhasil dan sekaligus mengakhiri kekuasaan Farouk di Mesir. Pada saat itu, Gamal tidak langsung naik menjadi pemimpin Mesir menggantikan Farouk, karena masih berusia 35 tahun. Muhammad Naguib lah yang tampil sebagai pemimpin dengan dukungan dari Gamal Abdul Nasser. Namun, pada tanggal 18 Juni 1956 Gamal Abdul Nasser tampil sebagai presiden Mesir setelah banyak terjadi perselisihan dengan Muhammad Naguib.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Isa 'Asyur. (2005). *Hadist Tsulatsa': Ceramah-Ceramah Hasan Al Banna 1*. Solo: Era Intermedia.
- Alexander, Anne. (2005). *Nasser: His Live and Time*. London: Haus Publishing Limited.
- Ali Abdul Halim Mahmud. Manhaj at-tarbiyah 'inda al-ikhwanul muslimin. Alih bahasa oleh Syairil Halim. (1997). *Ikhwanul Muslimin: Konsep Gerakan Terpadu Jilid 2*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ali Muhammad Garishah. (1988). *Dakwah&Sang Dai: Kharisma Hasan Al Banna*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Aksan Andono. (1956). *Krisis di Timur Tengah (Mesir): Kumpulan Diskusi-Diskusi*. Yogyakarta: UGM Press.
- A.Najiyulloh. (1993). *Gerakan Keagamaan dan Pemikiran: Akar Ideologis dan Penyebarannya*. Jakarta: Al-Ishlahy.
- Anshari Thayib dan Anas Sadaruwan. (1981). *Anwar Sadat: Di Tengah Teror dan Damai*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Apriadi Tamburaka. (2002). *Revolusi Timur Tengah: Kejatuhan Para Penguasa Otoriter di Negara-negara Timur Tengah*. Yogyakarta: Narasi.
- Archer, Jules. (2007). *Kisah Para Diktator: Biografi Politik Para Penguasa Fasis, Komunis, Despotis, dan Tiran*. Tangerang: Narasi.
- Al-Muslim, Asy-Syabab. Judul asli tidak dicantumkan, Alih bahasa oleh Afif Muhamma. (1984). *Pengadilan Terhadap Ikhwanul Muslimin*. Bandung: Pustaka.
- Ata, Mohamed Moustofa. Judul asli tidak dicantumkan, Alih bahasa oleh M. Yehia Eweis. (1955). *Egypt Between Two Revolution*. Cairo: Imprimerie Misr S.A.E.
- Best, John W. Research in Education. Alih bahasa oleh: Sanapiah Faisal dan Mulyani Guntur Winesa. (1982). *Penelitian Pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Cremeans, Charles D. (1963). *The Arabs and The World: Nasser's Arab Nationalist Policy*. New York: Council On Foreign Relations By Frederick A Preager.
- Darsiti Soeratman. (2012). *Sejarah Afrika*. Yogyakarta: Ombak.
- Dawisha, Adeed. (1989). *Islam in Foreign Policy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Esposito, John. Judul asli tidak dicantumkan, alih bahasa oleh Wardah Hafidz. (1985). *Islam dan Perubahan Sosial Politik di Negara Sedang Berkembang*. Yogyakarta: PLP2M.
- _____. Judul asli tidak dicantumkan. Alih bahasa oleh A. Rahman Zainussi. (TT). *Identitas Islam pada Perubahan Sosial-Politik*. Jakarta: Bulan Bintang.

- _____. Islam and Development Religion and Sociopolitical Change. Alih bahasa oleh S H S. (1985). *Agama dan Perubahan Sosiopolitik*. Aksara Persada Press.
- Esposito, John L dan John O Voll. (1999). *Demokrasi di Negara-Negara Muslim*. Bandung: Mizan.
- _____. Makers of Contemporary Islam. Alih bahasa oleh Sugeng Hariyanto dkk. (2002). *Tokoh-Kunci Gerakan Islam Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Gottschalk, Louis. Understanding History: A Primer of Historical Method. Alih bahasa oleh Nugroho Notosusanto. (1985). *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI Press.
- Israel, Gershoni dan Jankowski, James P. (1986). *Egypt, Islam, and The Arabs: The Search for Egyptian Nationhood, 1900-1930*. Oxford: Oxford University Press.
- Harris, Lillian Crag. (1988). *Egypt: Internal Challenges and Regional Stability*. New York: Royal Institute of International Affairs.
- Harun Nasution. (1975). *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hitti, Philip K. (2001). *Sejarah Ringkas Dunia Arab*. Yogyakarta: Iqra' Pustaka.
- Lapidus, Ira M. A History of Islamic Societies. Alih bahasa oleh: Ghufroon A. Mas'adi. (1999). *Sejarah Sosial Ummat Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ishak Mussa Al Husaini. (1983). *Ikhwanul Muslimun: Tinjauan Sejarah Sebuah Gerakan Islam (Bawah Tanah)*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Jameelah, Maryam. (1965). *Islam dan Modernisme*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Imam Munawwir. (1986). *Posisi Islam di Tengah Pertarungan Ideologi dan Keyakinan*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Jurusan Pendidikan Sejarah. (2006). *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Skripsi*. Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial UNY
- Kirdi Dipoyudo. (1977). *Timur Tengah dalam Pergolakan*. Jakarta: Yayasan Proklamasi.
- Kuntowijoyo. (1994). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- _____. (1995). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Benteng Budaya.
- Mansfield, Peter. (1969). *Nasser's Egypt*. Harmondsworth: Penguin Books.
- _____. (1991). *A History of The Middle East*. Harmondsworth: Penguin Books.
- Mohamed Heikal. (1984). *Anwar Sadat: Kemarau Kemarahan*. Yogyakarta: Grafity Press.
- Nasser, Gamal Abdul. (TT). *The Philosophy of The Revolution*. Cairo_U.A.R: Ministry of National Guidance Information Administration.
- Nourouzzaman Shaddiqi. (1984). *Menguak Sejarah Muslim: Suatu Kritik Metodologis*. Yogyakarta: PLP2M.
- Nordlinger, Eric A. (1990). *Militer dalam Politik: Kudeta dan Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Oemar Amin Hoesin. (1953). *Gelora Politik Negara-negara Arab*. Jakarta: Tintamas.
- Renier, G.J. A History its Purpose and Method. Alih bahasa oleh Muin Umar. (1997). *Metode dan Manfaat Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rifyal Ka'bah. (1994). *Islam dan Serangan Pemikiran: Sebuah Gejala al-Ghazwul Fikri*. Jakarta: Granada Nadia.
- Riza Sihbudi, M. (1991). *Bara Timur Tengah: Islam, Dunia Arab, Iran*. Bandung: Mizan.
- Hawa, Said. Fi Afiqat Taalim, Dirasah fi Da'awatil Ustadz Hasan Al Banna wa Nazhariyatil Harakah fiha min Khilali Risalattit Ta'alim. Alih bahasa oleh Abu Ridha dan Wahid Ahmadi. (2005). *Membina Angkatan Mujahid Studi Analisis atas Konsep Dakwah Hasan Al Banna dalam Risalah Ta'alim*. Solo: Era Intermedia.
- Sartono Kartodirdjo. (1992). *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta : Gramedia.
- Sidi Gazalba. (1971). *Modernisasi dalam Persoalan Bagaimana Sikap Islam?*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Tawil, T. El. (TT). *Mesir dan Islam*. Jakarta: Kedutaan Besar Mesir.
- Taylor, Alan R. The Arab Balance of Power. Alih bahasa oleh Abubakar Basyarahil. (1982). *Pergeseran-pergeseran Aliansi dalam Sistem Perimbangan Kekuatan Arab*. Jakarta: Amar Press.
- Yusuf Qardhawi. Judul asli tidak dicantumkan, Alih bahasa oleh Moh. Nabhan Husein. (1983). *Sistem Pendidikan Ikhwanul Muslimin*. Jakarta: Media Da'wah.

Surat Kabar

- “Penangkapan-Penangkapan Para Pembesar dan Pembebasan Tawanan Politik”. Suara Masyarakat (Senin 4 Agustus 1952). Malang.
- “Farouk Takut Pada Wartawan: Pelabuhan Napels Dijaga Ketat”. Suara Masyarakat (Kamis 31 Juli 1952). Malang.
- “Krisis Politik Mesir”. Pewarta Soerabaia (Kamis 3 Juli 1952). Surabaya: N.V. Pewarta-Soerabaia.
- “Pemberontakan Militer di Mesir”. Pewarta Soerabaia (Kamis 24 Juli 1952). Surabaya: N.V. Pewarta-Soerabaia.
- “Aly Maher Pasha”. Suara Masyarakat (Jumat 25 Juli 1952). Malang.
- “Pertempuran Meletus di Cairo Sekitar Coup D'etat di Mesir”. Suara Masyarakat (Jumat 25 Juli 1952). Malang.
- “Farouk Turun Tachta dan Tinggalkan Mesir”. Suara Masyarakat (Senin 28 Juli 1952). Malang.
- “Mesir Lagi, Kerusuhan Sektarian Pecah”. Kompas (Senin 9 Mei 2011).

Jurnal

- Hamdan Basyar, M. (1998). “Bagaimana Militer Menguasai Mesir”, *Jurnal Ilmu Politik* 3. Jakarta: Gramedia.

Khoiruddin Nasution. (2000). “Gerakan Militan Islam Mesir dan Relevansinya dengan Politik Islam Indonesia: Studi Gerakan Ikhwanu Al-Muslimin”, *UNISIA Islam dan Politik Jurnal Ilmu-ilmu Sosial No 41/XXI/IV/2000*. Yogyakarta: UII Press.

Maman Abdul Malik. (1992). “Memahami Masa Lampau dengan Pendekatan Multidimensional”. *Al Jami'ah: Jurnal Ilmu Pengetahuan Agama Islam No 55 Tahun 1992*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga.

Majalah

Abdurrahman Wahid. (1984). “Massa Islam dalam Bernegara”. *Prisma*. Jakarta: LP3ES.

Amien Rais, M. (1984). “Gerakan-gerakan Islam Internasional dan Pengaruhnya bagi Gerakan Islam Indonesia.” *Prisma*. Jakarta: LP3ES.

Yusron, M. (1989). “Orientalisme, Modernisasi, dan Ekonomi-Politik Tiga Pendekatan di Dalam Studi Sejarah Islam Mesir sebagai Kasus”, *Al-Jami'ah: Majalah Ilmu Pengetahuan Agama Islam No 38 Tahun 1989*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press.

Internet

United States Library of Congress, *Egypt-The Revolution and The Early Years of The New Government: 1952-1956*, dalam situs www.countrystudies.us/egypt/32 diakses 20 Maret 2012, pukul 12:40.